

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesulitan keuangan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh manusia. Hal ini dapat disebabkan dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit dan kurangnya perencanaan keuangan, serta pengetahuan terhadap melek keuangan yang belum maksimal. Dengan begitu setiap individu harus memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber keuangan pribadinya secara efektif demi kesejahteraan.

*Q.s Surat Al-Alaq:1-5*

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  
(4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Perkembangan zaman saat ini membuat kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi semakin kompleks. Hal ini yang terkadang mendorong pola hidup konsumtif menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat, di mana melakukan pembelian akan hal-hal yang tidak mempertimbangkan dampak kedepannya seolah-olah menjadi hal yang

biasa. Kemudahan dalam bertransaksi memberikan dampak positif dan negatif dalam pengelolaan keuangan seseorang. Pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu faktor dari kondisi keuangan dari seseorang yang terkadang menyebabkan seseorang berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Pengelolaan keuangan ini sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan (financial literacy) yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Semakin meningkatnya pemahaman akan literasi keuangan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang menabung dan berinvestasi sehingga semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta dapat menciptakan pemerataan pendapatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2013)

OJK mengelompokkan tingkatan literasi keuangan seseorang dibedakan menjadi empat jenis tingkat, yaitu: *Well Literate*, Pada tingkat ini, seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. *Suff Literat*,

pada tingkat ini, seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. *Less Literate*, Pada tingkat ini, seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. *Not Literate*, pada tingkat ini, seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

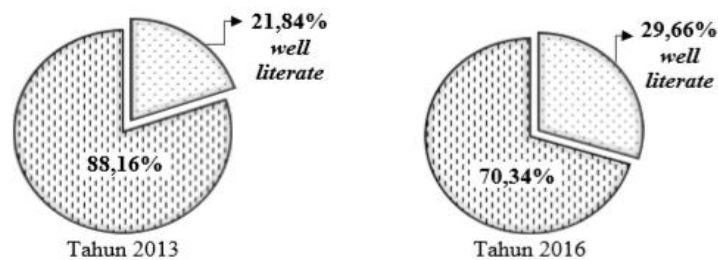
Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan tahun 2013 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong well literate hanya sebesar 21,8%, sufficient literate sebesar 75,69%, less literate sebesar 2,06% dan notliterate sebesar 0,41%. Data tersebut disajikan pada tabel 1.1, sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Indeks Literasi Keuangan Penduduk Indonesia tahun 2013**

| Indeks Literasi Keuangan | Prosentase (%) |
|--------------------------|----------------|
| Well Literate            | 21,8           |
| Sufficient Literate      | 75,69          |
| Less Literate            | 2,06           |
| Not Literate             | 0,41           |
| Total                    | 100            |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013

Literasi keuangan (*financial literacy*) menjadi salah satu pemahaman yang semakin diperlukan untuk menciptakan penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, agar tidak hanya memahami secara materi ataupun pemahaman saja, namun juga praktikpraktik agar mampu mengikuti perkembangan pasar keuangan. Literasi keuangan menjadi sebuah kebutuhan dasar yang berupa pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam keuangan sehingga dapat terhindar dari masalah keuangan.



Sumber : Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 OJK

**Gambar 1.1**  
**Hasil Survei Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia**  
**Tahun 2013 dan tahun 2016**

Pada gambar 1.1 menunjukkan hasil survei tingkat literasi keuangan di Indonesia yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pada tahun 2013 tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 21,84% pada tingkat *well literate* dan pada tahun 2016 cenderung naik menjadi 29,66% pada tingkat *well literate*. Kondisi ini dirasa cukup baik dikarenakan dari tahun 2013 ke tahun 2016 mengalami kenaikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pemerintah melalui Otoritas jasa keuangan terus berupaya menggejot untuk meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan keuangan dengan membentuk program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai wadah untuk pendidikan keuangan. Menurut Nababan dan Saladia pendidikan keuangan adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan dimasa depan demi memperoleh kesejahteraan yang sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani (Darman Nababan, 2013).

Dalam Penelitian terdahulu, (Bryne, 2007) berpendapat jika minimnya pengetahuan tentang literasi keuangan akan mengakibatkan kesalahan dalam menyusun rencana keuangan dan mengakibatkan bias untuk pencapaian kesejahteraan pada usia yang sudah tidak produktif. Jika jumlah masyarakat yang seperti ini banyak, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan nasional. Sedangkan (Agusta, 2016) menilai bahwa jika peningkatan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan akan berimbas pada tingginya pembiayaan pembangunan nasional, hal tersebut didasari oleh semakin tinggi jumlah masyarakat yang menabung ataupun berinvestasi pada produk dan jasa keuangan maka akan meningkatkan likuiditas untuk transaksi keuangan dan pembiayaan pembangunan yang mana nantinya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan ekonomi.

UMKM ini merupakan bagian penting bagi perekonomian Indonesia, Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan (Gunartin, 2017) menunjukkan bahwa perkembangan UMKM menjadi hal yang penting dalam pembangunan pada

bidang ekonomi di Indonesia, oleh sebab itu pentingnya perkembangannya menjadi pilar penting dalam perekonomian.

**Tabel 1.2**  
**Data Perkembangan UMKM di Indonesia**  
**Tahun 2012 – 2017 (dalam Unit)**

| <b>Tahun</b> | <b>Usaha Mikro (UMi)</b> | <b>Usaha Kecil (UK)</b> | <b>Usaha Menengah (UM)</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 2013         | 55.856.276               | 629.418                 | 48.997                     | 56.534.592    |
| 2014         | 57.189.393               | 654.222                 | 52.106                     | 57.895.721    |
| 2015         | 58.521.987               | 681.522                 | 59.263                     | 59.262.772    |
| 2016         | 60.863.578               | 731.047                 | 56.551                     | 61.651.177    |
| 2017         | 62.106.900               | 757.090                 | 58.627                     | 62.922.617    |

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 2018.

Pada table 1.1 diatas bisa di jelaskan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia pada tahun 2013-2017 selalu mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Selain itu perkembangan UMKM baik dari segi jumlah kontribusi dalam perekonomian nasional cukup besar.

UMKM ini merupakan bagian penting bagi perekonomian Indonesia, Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan (Gunartin, 2017) menunjukkan bahwa perkembangan UMKM menjadi hal yang penting dalam pembangunan pada bidang ekonomi di Indonesia, oleh sebab itu pentingnya perkembangannya menjadi pilar penting dalam perekonomian. UMKM juga berpengaruh pada perekonomian daerah-daerah di Indonesia, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut kepala BPS D.I.Y, Bapak Priyono, dalam tribun Jogja, industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman, konstruksi, dan perdagangan adalah penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) D.I.Y, kontribusinya mencapainya 53,40%. Keberlangsungan UMKM ini menjadi sangat penting bagi sektor perekonomian.

Manajemen keuangan di dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keberlangsungannya. Dalam siaran pers OJK tahun 2017, OJK menjadikan UMKM sebagai salah satu sasaran dari program strategi nasional literasi keuangan Indonesia, Tujuan utama dari program tersebut, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*), sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dengan demikian, minimnya pengetahuan akan literasi yang rendah akan berkurang dengan memanfaatkan berbagai sektor keuangan dan mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Literasi keuangan yang baik akan menjadikan manajemen yang baik juga untuk UMKM, dengan harapan akan berpengaruh terhadap perkembangannya.

**Tabel 1.3.**  
**Data Perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2012 – 2017**

| <b>Tahun</b> | <b>Usaha Mikro (UMi)</b> | <b>Usaha Kecil (UK)</b> | <b>Usaha Menengah (UM)</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 2013         | 111.912                  | 51.459                  | 31.121                     | 194.492       |
| 2014         | 120.725                  | 55.176                  | 33.326                     | 209.227       |
| 2015         | 125.863                  | 57.412                  | 34.737                     | 218.012       |
| 2016         | 130.525                  | 59.655                  | 36.031                     | 226.211       |
| 2017         | 135.799                  | 62.042                  | 37.472                     | 235.313       |

Sumber: Bappeda D.I.Yogyakarta 2017

Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013–2017, dengan berbagai macam bidang, jumlah ini tersebar ke dalam lima kabupaten. Dilihat dari jumlah UMKM yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahu 2012-2017 selalu mengalami

kenaikan pada tiap tahunnya. Unit Usaha Mikro menjadi penyumbang angka terbesar dalam UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di lima kabupaten kota, menurut survey yang dilakukan dinas koperasi dan umkm, jumlah UMKM terbanyak terletak di kabupaten Bantul dengan persentase 26%, di susul oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 22%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 20%, Kabupaten Sleman 18%, dan yang terakhir Kota Yogyakarta sebesar 14%. Dilihat dari jumlah penyebaran UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di kabupaten Kulon Progo, merupakan hal yang menarik untuk di teliti pada sektor UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo tersebut.

Kabupaten Kulon Progo termasuk kedalam daerah unggulan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak sekali potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dari kabupaten Kulon Progo, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan hingga sektor industri kreatif. Sejak tahun 2016 perekonomian Kulon Progo menunjukkan trend positif sehingga menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang semakin kondusif, hal ini memberikan dampak terhadap perekonomian yang tumbuh sebesar 4,76% dari tahun sebelumnya, hal inilah yang membuat pemerintah DIY makin fokus untuk mengembangkan potensi UMKM dan industri di Kabupaten Kulon Progo.



**Tabel 1.4.**  
**Data Perkembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo**  
**Tahun 2013 – 2017**

| <b>Tahun</b> | <b>Usaha Mikro (UMi)</b> | <b>Usaha Kecil (UK)</b> | <b>Usaha Menengah (UM)</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 2013         | 32.922                   | 410                     | 59                         | 33.391        |
| 2014         | 33.132                   | 558                     | 64                         | 33.754        |
| 2015         | 33.138                   | 570                     | 69                         | 33.784        |
| 2016         | 33.340                   | 613                     | 76                         | 34.029        |
| 2017         | 33.970                   | 644                     | 82                         | 34.698        |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Kulon Progo 2019

Di lihat dari tabel di atas jumlah UMKM di Kabupaten Kulon Progo Setiap tahun mengalami peningkatan, dilihat dari Usaha Mikro merupakan penyumbang unit usaha terbanyak yang setiap tahun mengalami peningkatan walaupun peningkatan yang ada tidak terlalu signifikan. Jumlah Usaha Mikro di Kulon Progo terus mengalami peningkatan sehingga nantinya bisa menjadi ujung tombak perekonomian Kulon Progo dan cara pengelolaan usaha juga berpengaruh terhadap konsistensi dan berkembangnya suatu usaha, maka dari itu dibutuhkannya pengetahuan tentang literasi keuangan. Karna literasi keuangan berpengaruh positif kepada perkembangan Usaha Mikro itu sendiri.

Kriteria usaha mikro dijelaskan dalam Undang–undang No. 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah, menjelaskan bahwa Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang–undang ini. Kriteria Usaha Mikro antara lain adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Tingkat literasi keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor demografi. Demografi merupakan ilmu yang mendalami susunan dan proses penduduk di suatu wilayah. Demografi menjadi salah satu alat untuk mendalami perubahan penduduk dengan menggunakan data kependudukan serta perhitungan matematis mengenai perubahan jumlah, persebaran dan susunannya (Samosir, 2013). Faktor demografi menurut (Keown, 2011) meliputi usia, jenis kelamin, status keluarga, status migrasi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tempat tinggal dan regional. Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan menurut (Murugiah, 2016) adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan. Sedangkan menurut (Jeyaram, 2015) menyatakan bahwa jenis kelamin, program studi, suku atau keturunan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan. Menurut (Stiawan, 2018), faktor yang mempengaruhi literasi keuangan tingkat pendidikan dan lama usaha berpengaruh.

Menurut OJK dalam *Indonesian National Strategy For Financial Literacy* (2013), menjelaskan bahwa usia, pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan dan distribusi geografis adalah faktor demografi untuk menilai tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia. Faktor demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, lama usaha, dan omzet penjualan.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah, untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo,

Daerah Istimewa Yogyakarta. Memperkenalkan produk layanan jasa keuangan seperti investasi, menabung, dan meminjam serta asuransi. Selain produk jasa keuangan, literasi keuangan dapat menjadi akses dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku disektor Usaha Mikro dibidang dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas dan membahayakan masyarakat. Seperti terhindar dari berbagai penyedia jasa keuangan yang ilegal (tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam penelitian ini, selain melihat tingkat literasi keuangan, peneliti juga melihat dari karakteristik pelaku Usaha Mikro, seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, pengeluaran, dan lama usaha, sebagai faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan bagi para pelaku usaha khususnya bagi para pemilik Usaha Mikro. Dengan demikian peneliti ingin menganalisis faktor pengetahuan literasi keuangan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang tingkat literasi keuangan (*financial literacy*) yang harus dimiliki pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta demi mencapai pemahaman tingkat literasi keuangan. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan yang terdapat pada penelitian ini adalah peneliti hanya fokus menganalisis dan mengamati tingkat literasi keuangan pada para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menghubungkan antar variabel yang ada, seperti Usia para pelaku, lama usaha, tingkat pendidikan dan pendapatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah peneltian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat literasi pada para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo?
2. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jenis kelamin?
3. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan usia?
4. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan lama usaha?
5. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tingkat pendidikan?
6. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pendapatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian, mengenai tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan jenis kelamin pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui ada perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan usia pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk mengetahui ada perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan lama usaha pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo.
5. Untuk mengetahui ada perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan tingkat pendidikan pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo.
6. Untuk mengetahui ada perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan pendapatan pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian mengenai tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh bagi:

1. Pelaku Usaha Mikro sebagai solusi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keuangan.
2. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah terkait, sebagai referensi agar dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi mengenai lembaga keuangan kepada pelaku Usaha Mikro.
3. Sebagai referensi akademik dalam mengkaji perkembangan literasi keuangan pada penelitian selanjutnya.